

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan ini terbagi menjadi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, di mana pembangunan daerah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional (Saputra, 2024). Pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas berbagai sumber daya yang dimiliki oleh negara, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Maisaroh dan Risyanto, 2018).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal penting untuk menilai bagaimana perekonomian suatu tempat berjalan, karena menunjukkan seberapa baik pembangunan ekonominya. Perekonomian suatu negara bisa dinilai melalui Produk Domestik Bruto. Sedangkan untuk melihat kondisi perekonomian di suatu daerah atau wilayah, bisa dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi ukuran penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena mencerminkan seberapa majunya pembangunan ekonomi di daerah tersebut (Anfas, 2021).

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan sebagai metrik yang mencerminkan total pendapatan suatu daerah. Metrik ini tidak hanya memberikan gambaran tentang seberapa berhasil pembangunan ekonomi di suatu wilayah, tetapi juga menunjukkan kemajuan ekonomi yang telah dicapai. PDRB merupakan alat penting untuk mengevaluasi kondisi ekonomi suatu daerah dalam rentang waktu tertentu, baik dengan mempertimbangkan harga saat ini maupun harga tetap. Secara esensial, PDRB mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah, mencerminkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Data PDRB menjadi salah satu indikator utama dalam analisis ekonomi makro yang memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi daerah

setiap tahunnya. PDRB dengan harga tetap juga dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh atau menganalisis komponen pengeluaran dari tahun ke tahun (Sulaksono, 2015).

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dengan garis pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Provinsi ini memiliki luas sekitar 42.011,89 km² dan terdiri dari 19 kabupaten dan kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Sumatera Barat sekitar 5,6 juta jiwa. Provinsi ini terkenal dengan keragaman budaya dan tradisi Minangkabau yang kental, serta dikenal sebagai pusat pendidikan dengan banyaknya universitas dan sekolah berkualitas. Selain itu, Sumatera Barat memiliki potensi alam yang melimpah, seperti hasil bumi dari sektor pertanian, perkebunan, serta sumber daya alam lainnya, termasuk pariwisata dengan destinasi populer seperti Bukittinggi, Danau Maninjau, dan Pantai Air Manis (Juwita dan Widia, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat penting untuk memahami bahwa ekonomi provinsi ini ditopang oleh beberapa sektor utama. Pertanian, perkebunan, dan perikanan masih menjadi sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, namun sektor industri dan jasa, termasuk pariwisata, juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, berperan penting dalam perkembangan ekonomi Sumatera Barat, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan sektor industri. Pengeluaran pemerintah juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial berdampak langsung pada peningkatan PDRB. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dan pengembangan tenaga kerja yang terampil ataupun produktif turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Hafiz dan Haryatiningsih, 2020).

Tabel 1. 1 PDRB ADHK Provinsi Sumatera Barat Harga Konstan (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB
2019	172.205.571
2020	169.426.614
2021	174.999.892
2022	182.629.143
2023	191.071.351

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Tabel 1.1 menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat pada harga konstan dengan satuan juta rupiah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, PDRB Sumatera Barat mencapai Rp172.205.571 juta. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi Rp169.426.614 juta yang mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2021, PDRB mulai pulih dan meningkat menjadi Rp174.999.892 juta, menandakan adanya pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022, di mana PDRB naik menjadi Rp182.629.143 juta dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai Rp191.071.351 juta. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi dan tren pemulihan dalam PDRB Sumatera Barat selama periode tersebut. Penurunan pada tahun 2020 menggarisbawahi dampak signifikan pandemi terhadap ekonomi daerah, sementara kenaikan pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan upaya pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi relevan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dengan menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja, serta pengeluaran pemerintah. Kajian ini disuguhkan dapat memberikan keilmuan tentang kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian yang berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing suatu wilayah. Secara sederhana, investasi adalah penanaman modal oleh individu,

perusahaan, atau pemerintah untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam konteks ekonomi makro, investasi seringkali mencakup pembelian peralatan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan teknologi yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Investasi memainkan peran kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Ketika investasi meningkat, perusahaan dapat memperluas operasionalnya, memperbarui teknologi, dan meningkatkan efisiensi produksi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan output ekonomi dan PDRB (Salim, 2019).

Selain itu, investasi juga dapat menarik lebih banyak tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat. Hal ini menciptakan efek multiplier dalam perekonomian, di mana peningkatan permintaan akan barang dan jasa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam konteks Sumatera Barat, analisis pengaruh investasi terhadap PDRB akan membantu memahami sejauh mana investasi dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mendorong investasi lebih lanjut (Afrizal, 2013).

Tabel 1. 2 Investasi Di Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah)

Tahun	Investasi
2019	3.026.645,80
2020	3.106.178,70
2021	4.183.713,90
2022	2.559.750,70
2023	4.488.227,20

Sumber: Badan Pusat Statistik. data diolah

Tabel 1.2 menunjukkan bahwasanya investasi di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir terlihat adanya fluktuasi. Pada tahun 2019, total investasi mencapai Rp3.026.645,80 juta, angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp3.106.178,70 juta meskipun terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada perekonomian global. Peningkatan investasi yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 di mana total investasi mencapai Rp4.183.713,90 juta. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemulihan ekonomi

pasca pandemi di mana pemerintah dan sektor swasta mulai kembali aktif dalam berbagai proyek pembangunan dan pengembangan ekonomi. Namun, pada tahun 2022 investasi mengalami penurunan tajam menjadi Rp2.559.750,70 juta. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan investasi atau kendala-kendala lainnya yang menghambat aliran modal. Pada tahun 2023, investasi kembali menunjukkan peningkatan mencapai Rp4.488.227,20 juta. Kenaikan ini menunjukkan adanya optimisme dan perbaikan kondisi ekonomi di Sumatera Barat. Peningkatan investasi pada tahun ini dapat diindikasikan sebagai hasil dari berbagai kebijakan pemerintah yang lebih pro-investasi, stabilitas politik dan ekonomi serta upaya-upaya peningkatan infrastruktur dan kemudahan berbisnis di daerah tersebut. Sehingga, fluktuasi investasi ini sangat relevan untuk dianalisis. Investasi yang meningkat pada tahun-tahun tertentu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap PDRB. Namun, penurunan investasi yang tajam juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi investasi serta bagaimana investasi ini berinteraksi dengan variabel lain seperti tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah dalam menentukan kinerja ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, pengeluaran daerah merujuk pada seluruh belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai berbagai aktivitas dan program pembangunan di wilayahnya. Pengeluaran ini mencakup berbagai aspek termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya yang bertujuan untuk mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur (Malau *et al.*, 2020). Pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan PDRB melalui berbagai saluran. Pertama, pengeluaran untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik dapat mempercepat distribusi barang dan jasa serta menarik investasi baru. Kedua, belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ketiga, pengeluaran untuk program sosial dan ekonomi dapat menciptakan

lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Maisaroh dan Risyanto, 2018).

Tabel 1. 3 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2018	25.395.294.387,94
2019	26.542.915.526,62
2020	24.190.729.362,16
2021	25.637.347.594,43
2022	25.896.581.943,47

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi, mencerminkan berbagai faktor ekonomi dan kebijakan fiskal. Pada tahun 2018, pengeluaran pemerintah mencapai Rp25.395.294.387,94, dan angka ini meningkat menjadi Rp26.542.915.526,62 pada tahun 2019. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan program sosial yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan pengeluaran pemerintah menjadi Rp24.190.729.362,16. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan alokasi anggaran dialihkan untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial, serta menekan belanja pemerintah di sektor-sektor lain. Meskipun begitu, pada tahun 2021, pengeluaran pemerintah kembali meningkat menjadi Rp25.637.347.594,43 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp25.896.581.943,47 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi pascapandemi melalui stimulus fiskal dan investasi di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah yang fluktuatif ini memiliki dampak terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Investasi pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja. yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi domestik. Selain itu, tenaga kerja yang terampil dan produktif merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat krusial (Taufiq *et al.*, 2022). Dengan demikian, kombinasi antara investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah merupakan pilar utama dalam mendorong pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan yang tepat dalam mengalokasikan anggaran pemerintah serta mendorong investasi swasta dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengeluaran pemerintah dipertimbangkan bersama dengan investasi dan tenaga kerja sebagai faktor utama yang mempengaruhi PDRB. Investasi berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan inovasi sedangkan tenaga kerja merupakan salah satu input utama dalam proses produksi. Ketiga variabel ini saling berinteraksi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengeluaran daerah dan dampaknya terhadap ekonomi sangat penting dalam menganalisis bagaimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat (Hafiz dan Haryatiningsih, 2020).

Akhirnya, melihat pentingnya investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan fiskal dan investasi dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi di daerah ini. Analisis yang lebih mendalam akan membantu mengidentifikasi keterkaitan antara alokasi anggaran, pengembangan tenaga kerja, dan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan PDRB. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat, memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia dimanfaatkan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan PDRB.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi di Provinsi Sumatera Barat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para akademisi dan peneliti dalam mengembangkan penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di kota atau kabupaten di Indonesia.